

# Strategi Politik Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda Tahun 2020

## Political Strategy of Independent Candidates in the 2020 Election Of Head Of The City Of Samarinda

Hizkiadven Sanggam Batara Lebang<sup>1</sup>, Iman Surya<sup>2</sup>, Letizia Dyastari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Vol. 10, No. 01

Page: 24-32

Published: 2022

### KEYWORDS

Political strategy, independent candidates, Pilkada

### CORRESPONDENCE

E-mail:

[hizkiadvensanggam@gmail.com](mailto:hizkiadvensanggam@gmail.com)

### A B S T R A C T

The purpose of this study was to find out the political strategy of independent candidates in the regional head elections in Samarinda City in 2020. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation, and secondary data. The data collection technique uses a qualitative descriptive model put forward by Miles and Huberman. This research was conducted in Samarinda City. The research focus is product, promotion, place, price. The results of the study show that there are several strategic patterns used by independent candidates, namely the 4p, namely political product (Product), Promotion (Promotion), Place (Place), Price (Price). The first is a political product made by independent candidates to attract attention. from the people in political products there is a vision and mission as well as excellent programs that will be carried out if elected as regional heads. Many people who are quite interested in independent candidates can be seen from the independent candidates asking for support from the public until at the time of the vote count in the local elections where the independent candidates garnered 51,652 supports and when the elections were held the independent candidates managed to collect 98,245 votes. They also carried out promotions for Attracting public attention, there are several methods used by independent candidates, namely using billboards, banners, online media, and face to face places. Independent candidates visit people in traditional markets to ask for support, and for budget prices provided by independent candidates Rp. 667,000,000 consisting of independent candidates' personal funds of Rp. 560,000,000 and donations from other parties of Rp. 107,000,000.

### INTRODUCTION

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yang mana demokrasi meruapakan sistem pemerintahan dimana setiap warga dapat ikut ambil dalam meberikan partisipasi serta aspirasi dalam perumusan atau pembuatan suatu kebijakan publik melalui wakil-wakil rakyat yang ada di dalam pemerintahan. Dalam sistem demokrasi partisipasi masyarakat menjadi sebuah pilar yang membangun sistem tersebut. Bentuk- bentuk partsipasi rakyat seperti mengontrol jalannya pemerintahan, serta penentuan dalam sebuah kebijakan. Beberapa hal penting terkait dengan asas demokrasi, yaitu Pemilu, Pemerintah bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat, Semua warga negara

mempunyai kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan menontrol pemerintah. Pemilihan kepala daerah adalah salah satu dari asas demokrasi yang di mana masyarakat harus menentukan pilihan mereka untuk menjadi wakil di dalam pemerintahan. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan dilaksanan secara serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi di 224 kabupaten dan 37 Kota di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Undang-undang yang telah di laksanakan perubahan maka peluang bagi masyarakat umum untuk menjadi seorang kepala daerah sekarang terbuka lebar, karena calon kepala daerah sudah tidak mesti dari partai politik.

Mengingat lima tahun ke belakang pada tahun 2015 tidak ada calon independen yang maju dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Samarinda, pada tahun 2020 calon independen atau calon perseorangan hadir kembali pada pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda. hal ini justru membuat kontestasi politik tahun 2020 jauh berbeda dibandingkan Pilkada pada tahun 2015 lalu, karena adanya calon independen yang maju pada Pilkada tahun 2020 ini, hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat menginginkan suasana yang baru dalam perebutan kursi kepemimpinan di Kota Samarinda, calon independen yaitu Zairin Zain dan Sarwono menyerahkan dukungan awal sebanyak 69.456 setelah diverifikasi ulang oleh KPU Kota Samarinda mendapatkan dukungan sah sebanyak 51.652 dari masyarakat hal itu melebihi syarat minimal 43.977 dukungan yang harus dikumpulkan oleh calon independen untuk bisa melakukan pendaftaran untuk bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda, di samping itu calon independen lainnya yaitu Parawansa Assoniwora dan Markus Tarok Allo menyerahkan dukungan awal sebanyak 44.756 tetapi setelah di tinjau kembali oleh KPU total dukungan yang sah hanya 22.358, yang artinya tidak memenuhi syarat dari komisi pemilihan umum Kota Samarinda syarat minimal yang sudah di tetapkan oleh KPU Kota Samarinda yaitu 43.977.

## THEORETICAL FRAMEWORK

### Strategi politik

Strategi politik adalah strategi yang biasanya digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Strategi politik biasa digunakan dalam ajang pesta politik, para kandidat-

kandidat melakukan banyak usaha untuk merebut serta mempertahankan kekuasaan mereka. Strategi ini juga sangat berhubungan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk mencapai suatu kekuasaan serta pengaruh dengan cara meraih hasil (suara) yang optimal di dalam pemilu sehingga dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada perubahan masyarakat (Schroder. 2009: 7). Strategi politik digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Dalam kajian yang berbeda strategi politik dipandang sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan suatu kontestasi politik, baik dalam pemilihan umum ataupun Pilkada. Dalam perebutan kekuasaan baik dalam pemilihan umum ataupun Pilkada strategi politik menjadi kunci yang sangat penting, maka dari itu harus mempunyai strategi politik yang matang jika menginginkan suatu kemenangan di dalam kontestasi politik. Senada dengan yang diungkapkan oleh Schorder (2010:7), Strategi politik merupakan suatu rencana untuk melakukan suatu tindakan yaitu penyusunan dan pelaksanaan strategi yang sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya calon dalam suatu pemilihan.

### Marketing Politik

Menurut Nursal (2013:354), *political marketing* adalah seluruh rangkaian aktivitas yang sudah terencana, strategis dan juga taktis, berdimensi jangka panjang maupun jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Sementara itu, hal yang ditekankan dalam *political marketing* adalah bagaimana penggunaan pendekatan serta metode *marketing*, untuk dapat membantu politikus maupun partai politik agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat Firmanzah (2012:194) menyebut empat elemen 4P untuk membentuk makna politis yaitu :

1. Produk (Product)
2. Promosi (promotion)
3. Tempat (place)

#### 4. Harga (Price)

##### Calon perseorangan

Arbi Sanit (2017:18) berpendapat bahwa calon independen adalah tokoh masyarakat ikut dalam kontestasi pemilu tanpa adanya partai politik atau yang biasa disebut dengan calon perseorangan atau calon independen, mereka memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan serta kemampuan pribadi. Di belahan negara lain, calon independen muncul untuk menampung aspirasi golongan minoritas, sekalipun keberhasilannya lebih sukar tercapai dalam pemilu nasional maupun pemilu daerah (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007). Dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran Menimbang huruf b. UU No 12 Tahun 2008 di atas dinyatakan secara tegas: "Untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan".

##### Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang keanggotaannya mempunyai orientasi, tujuan serta cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2017: 404). Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses berdemokrasi, dan dapat dikatakan sebagai salah satu penentu masa depan serta regenerasi para pemimpi negara, serta partai politik menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Menurut Huntington Samuel P. (2003) Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kepentingan politik. Partai politik

sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830 sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.

##### Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Menurut peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di mana kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung ini,

masyarakat akan lebih mengetahui calon-calon pemimpin yang akan mereka pilih nantinya, dengan turunnya paslon ditengah masyarakat hal ini sekaligus membuat kedekatan masyarakat dan calon pemimpin menjadi dekat, maka dari itu Pilkada diharapkan dapat mewujudkan sistem politik yang berkualitas dan stabil.

## METHOD

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa uraian atau kata-kata dan bukan angka-angka. Saryono (2010:1) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda.

## RESULT AND DISCUSSION

### Produk (*Product*)

Dalam poin ini berusaha menguraikan produk politik dari calon independen yaitu visi misi serta program kerja yang akan dilakukan ketika calon independen terpilih menjadi kepala daerah, untuk visi dari calon independen yaitu *Samarinda Bangkit* yang tercipta dari kondisi Kota Samarinda, Samarinda bangkit juga menyatakan kurangnya perkembangan pembangunan di Kota Samarinda, maka dari itu calon independen coba untuk membuat Kota Samarinda menjadi bangkit mulai dari masyarakat, pemerintah, yang harus bangkit untuk membangun Kota Samarinda. Sedangkan untuk misi dari calon independen sendiri adalah berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan dan birokrasi. Semua harus bangkit untuk membangun Kota Samarinda. Berikut penjabaran mengenai visi dan misi serta program prioritas yang menjadi unggulan dari kandidat Zairin Zain dan Sarwono di Pilkada Samarinda.

Selain itu produk politik yang dibuat

oleh calon independen seperti memberikan subsidi perlengkapan sekolah pelajar keluarga pra sejahtera, memberikan beasiswa pendidikan bagi pelajar berprestasi dan pelajar keluarga pra sejahtera yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lewat pendidikan, selain itu juga calon independen melakukan peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Kemudian dalam sektor ekonomi calon independen berupaya melakukan peningkatan ekonomi dengan melakukan rehabilitasi dan pengembangan kawasan strategis ekonomi (citra niaga, pasar segiri i & ii, palaran trade center, dan pasar-pasar tradisional) kemudian menciptakan 25.000 lowongan kerja baru, calon independen juga memberikan kemudahan akses modal usaha kalangan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Lalu calon independen juga mempunyai program prioritas untuk masalah penanggulangan banjir seperti melakukan normalisasi bantaran sungai karang mumus, sungai karang asam besar, dan sungai karang asam kecil, dan melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase kota secara terintegrasi. Dengan dibuatnya produk politik ini ternyata dapat menarik perhatian masyarakat terbukti, dari 10 kecamatan di Samarinda, kandidat ini mampu menguasai suara 3 kecamatan.

### Promosi (*Promotion*)

Kemudian calon independen juga melakukan promosi untuk meningkatkan popularitas serta elektabilitas dari pasangan calon independen. Kandidat Zairin Zain, mereka juga memfokuskan pemasangan spanduk di tiga kecamatan seperti Kecamatan Samarinda Ulu, persisnya di Jalan Pramuka, Kelurahan Sempaja Selatan. Kemudian ada juga di Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis tepatnya di Jalan dr Soetomo, Perempatan Lampu Merah Lembuswana. Selanjutnya ada

juga di Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Bandara tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Pasangan independen ini juga memfokuskan publikasi di Kecamatan Sungai Kunjang. Meski demikian, dari pengakuan Kandidat Zairin Zain, hasil publikasi lewat baliho dan spanduk sebenarnya tak terlalu membantu untuk peningkatan popularitas mereka, justru yang banyak memberikan *support* yang banyak memberikan dukungan suara adalah terjun langsung ke masyarakat, kemudian promosi lewat media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* serta bekerjasama dengan *influencer* Samarinda.

Tak hanya itu, calon independen ini juga banyak dibantu lewat pemberitaan media online dan cetak. Dalam penggunaan media online calon independen kurang mendapatkan respon dari masyarakat terlihat di akun official *facebook* milik calon independen pengikut yang mereka miliki sebanyak 1,9 ribu pengikut. Dengan demikian, promosi yang dilakukan calon independen ini sifatnya terstruktur. Mereka tak hanya menggunakan baliho dan spanduk untuk meraup dukungan dari warga. Jika hanya mengandalkan publikasi lewat media baliho, diyakini tak banyak memberikan pengaruh. Namun, cara tersebut akan sempurna bila memadukan dengan publikasi di media sosial, media online atau kanal berita (termasuk media cetak) serta turun langsung ke lapangan, bertemu langsung dengan warga. Dan hal tersebut memang dilakukan oleh kandidat Zairin Zain-Sarwono, enam bulan terakhir menjelang pilkada. Walaupun sebelumnya mereka juga menyapa warga tapi tak secara intens.

### Tempat (*Place*)

Dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk mengenalkan visi dan misi dari calon independen serta memaparkan program-program unggulan dilakukan hal tersebut tentunya untuk menarik perhatian masyarakat dan untuk menambah elektabilitas dari calon independen, pasangan Zairin Zain dan Sarwono.

Keduanya mengunjungi pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tepian, mulai dari Pasar Pagi, Pasar Segiri, Pasar Merdeka, Pasar Samarinda Seberang, Pasar Baka, sampai ke Pasar Makroman. Semua pasar tradisional ini dikunjungi satu per satu oleh calon independen. Mereka mensosialisasikan program-program mereka tentang rehabilitasi dan pengembangan kawasan strategis ekonomi. Salah satunya pasar tradisional, selain itu ada pula Citra Niaga, Pasar Segiri I dan II hingga Palaran Trade Center. Seandainya calon independen terpilih nanti menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota, mereka akan mendengarkan keinginan dari para pedagang seperti memperbaiki lapak-lapak yang sudah rusak, serta pasar-pasar yang sudah tidak layak kemudian dibangun kembali agar lebih nyaman ditempati. Dengan adanya program unggulan seperti itu maka nantinya akan merik kembali pengunjung untuk mengunjungi pasar-pasar tradisional tersebut. Tak hanya itu saja, pasar nanti juga dibangun tempat parkir, dengan demikian para pengunjung lebih rapi memarkir kendaraan. Akhirnya pasar lebih terlihat teratur.

Kandidat kepala daerah ini juga mengunjungi komunitas difabel atau disabilitas yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Khusus di Samarinda jumlahnya mencapai 2.000 orang. Tak hanya memberikan bantuan, mereka juga mensosialisasikan program-program unggulan yakni meningkatkan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas. Selain itu, calon independen ini juga membuka peluang kerja sama, bila ada kelompok disabilitas yang hendak membangun usaha. Kesempatan tersebut bisa tercipta lewat skema pemberian modal kepada para kelompok yang termarjinalkan ini. Dengan kemudahan akses modal tersebut, peluang lain bisa tercipta seperti membuka lapangan pekerjaan. Dan tahap akhir dari program ini adalah para penyandang disabilitas bisa mandiri dalam urusan ekonomi.

Selain itu calon independen ini juga

mendatangi warga-warga yang terdampak banjir. Berdasarkan data yang dihimpun penulis, pada 2019 lalu ada 56.123 warga Samarinda yang menjadi korban banjir. Puluhan ribu warga ini tersebar di 15 kelurahan serta 5 kecamatan. Dua kawasan paling parah adalah Jalan Gelatik dan Gunung Lingai, dua daerah ini memang dekat dengan luapan Sungai Karang Mumus. Sehingga saat banjir melanda, daerah ini terisolir. Batuan susah masuk, itu sebab uluran tangan begitu diperlukan saat itu. Pasangan calon wali kota dan wakil calon wali kota tersebut kemudian turun ke lokasi memberikan santunan. Mulai dari bantuan seperti mie instan, telur, minyak hingga nasi bungkus. Tak hanya itu saja, lewat ketua RT setempat bantuan uang diberikan yang kemudian bisa disalurkan ke masyarakat untuk membeli sembako.

Dalam kesempatan itu pula, calon independen menyampaikan program unggulan jika mereka terpilih nanti. Yakni penanggulangan banjir yang fokus utamanya merevitalisasi Waduk Benanga, dengan menormalkan kembali daya tampung hingga 1.500.000 meter per kubik, selain itu mereka juga akan melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam Besar, dan Sungai Karang Asam Kecil. Dengan adanya program-program unggulan yang sudah dibuat oleh calon independen ini sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, terutama persoalan banjir yang hingga kini masih saja terjadi. Selain itu juga pasangan calon independen yaitu Zairin Zain dan Sarwono mengunjungi masyarakat di berbagai kecamatan untuk memaparkan program-program unggulannya selain penanggulangan masalah banjir, calon independen juga mempunyai program unggulan yaitu meningkatkan sumberdaya manusia lewat pendidikan, dengan memberikan beasiswa terhadap pelajar yang berprestasi dan keluarga pra sejahtera Sehingga kualitas pendidikan di Kota Samarinda makin meningkat.

### Harga (*Price*)

Biaya merupakan hal yang terpenting di dalam suatu peseta demokrasi, harga dalam poin ini dibagi menjadi tiga yaitu ada harga secara ekonomi, harga secara psikologis dan harga citra nasional. Untuk harga secara ekonomi di sini adalah biaya atau anggaran yang sudah disediakan oleh calon independen besaran biaya yang disediakan oleh calon independen untuk melakukan serangkaian kampanye, data yang dihimpun oleh penulis dari KPU Kota Samarinda terungkap total besaran dana yang dimiliki oleh calon independen sebanyak Rp667.000.000. Dana tersebut terdiri dari anggaran pribadi calon independen sebesar Rp560.000.000 serta dana sumbangan dari pihak lain sebanyak Rp107.000.000. Penggunaan biaya tersebut di gunakan untuk membuat spanduk, baliho, dan menyewa billboard untuk mempromosikan diri mereka. Meskipun anggaran kampanye calon independen kurang banyak jika dibandingkan dengan paslon dari jalur partai politik, yakni kandidat Andi Harun-Rusmadi Wongso sebesar Rp1.200.000.000, namun dengan biaya tersebut calon independen masih bisa mendapatkan 98.245 suara dari warga Samarinda. Total suara itu menempatkan paslon independen di posisi kedua setelah Paslon Andi-Rusmadi.

Kemudian untuk harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, contohnya apakah pemilih merasa nyaman dengan latar belakang yang dimiliki kandidat (agama, pendidikan, etnis dan lain-lain) dari seorang kandidat (calon kepala daerah). Masyarakat memilih calon independen dengan latar belakang yang dimiliki oleh calon independen, dari latar belakang yang dimiliki oleh calon independen yaitu Zairin Zain bekerja di birokrasi selama 32 tahun sedangkan Sarwono sebagai mantan DPRD Kota Samarinda yang menjabat 3 priode serta pengalaman-pengalaman yang mereka miliki pada saat bekerja di instansi pemerintahan dan di lembaga

legisatif. Sementara itu di beberapa kawasan terutama di daerah Sungai Pinang, Samarinda Utara dan Samarinda Ilir, masih banyak masyarakat yang belum mengenal calon independen dan lebih beralih kepada pasangan calon yang bersal dari partai politik. Sebab banyak yang kurang paslon tersebut, berbeda halnya dengan pasangan yang berasal dari partai politik contohnya pasangan urutan nomor dua, Andi Harun dan Rusmadi yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat karena punya riwayat dalam birokrasi juga parlemen. Misalnya, Andi Harun pernah menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Kalimantan Timur 1999-2004, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2004-2009, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2009-2014, selain itu juga Rusmadi yang mempunyai riwayat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2009-2016, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2015, Plt. Sekretaris daerah provinsi Kalimantan Timur 2015-2016, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2018. Dengan kata lain, kiprah keduanya di tengah masyarakat sudah terbukti.

Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa calon independen mempunyai kelamahan diantaranya adalah minimnya mesin politik. Calon kepala daerah perseorangan memiliki mesin politik yang *premature*. Dengan mesin politik yang terbatas, calon Perseorangan dituntut bekerja ekstra dalam perhelatan demokrasi. Selain itu calon independen juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan kompromi atau *bargaining* politik. Berbeda dengan partai politik yang sudah mempunyai wakil-wakil atau fraksi yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Untuk harga citra nasional, masyarakat percaya pasangan calon yang mereka pilih dapat membawa citra yang positif terhadap daerah mereka bahkan untuk Kota Samarinda. dengan program-program yang

sudah direncanakan jika terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat baik dan juga program-program yang dibuat merupakan kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, pemberian beasiswa kepada masyarakat menengah kebawah. Kemudian paslon tersebut juga mempunyai popularitas serta elektabilitas yang cukup tinggi. Mempunyai latar belakang yang baik serta keinginan yang kuat untuk dekat dengan masyarakat hal tersebut juga menjadi kunci utama untuk memberikan hal yang positif kepada masyarakat. selain itu janji-janji yang sudah diberikan kepada masyarakat harus ditepati agar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tidak tergerus atau berkurang.

#### **Faktor Pendukung Calon Independen Maju Dalam Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020**

Keikutsertaan calon independen atau calon perseorangan di dalam pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda Tahun 2020, membawa warna baru bagi pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda, karena di Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya tidak ada calon independen yang mencalonkan, tentunya dengan majunya calon independen mempunyai faktor pendukung untuk berani memekai jalur independen ini, karena calon independen sangat jauh berbeda mekanismenya dengan partai politik, selain itu yang menjadi faktor pendukung juga dengan adanya undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. Artinya seorang calon kepala daerah sudah tidak harus berasal dari partai politik lagi, melainkan masyarakat umum juga bisa mengambil bagian dalam pesta demokrasi tanpa harus memakai partai politik.

Selain itu faktor pendukung majunya

calon independen juga tergerak dari hati nurani dari paslon dengan melihat kondisi Kota Samarinda saat ini yang kurangnya perkembangan pembangunan. Menurut Firmanzah (Firmanzah, 2011:260), berpolitik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan *support* dari jaringan yang terbentuk, semakin luas dan solid jaringannya, semakin mempermudah pula dalam berpolitik. Sama halnya dengan calon independen yang mendapatkan dukungan dari masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang ada di Kota Samarinda untuk bisa ikut ambil dalam pemilihan kepala daerah atau pilwali, di samping karena tidak ada alternatif pilihan lain untuk masyarakat untuk memilih pemimpin, melihat setiap pemilihan kepala daerah selalu didominasi oleh partai politik sehingga membuat masyarakat jenuh karena tidak ada pilihan alternatif selain dari partai politik, dengan hadirnya calon independen pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 membuat ada pilihan baru kepada masyarakat untuk menentukan pilihan mereka, selain itu dengan masuknya calon independen pun membuat kontestasi politik atau pemilihan kepala daerah semakin meriah.

Selanjutnya faktor pendukung juga yang ditetapkan dalam PKPU 01 tahun 2020 pasal 3A ayat (1) yang di mana pasangan calon independen mempunyai hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan. dengan adanya hal tersebut yang membuat calon independen berani mengambail kesempatan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya faktor pendukung ini calon independen berani mengabil langkah untuk bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda tahun 2020.

## KESIMPULAN

1. Dari produk politik yang dibuat oleh calon independen seperti peningkatan sumber daya manusia lewat pendidikan, menciptakan 25.000 lowongan kerja baru,

serta penambahan ruang terbuka hijau di Kota Samarinda. walaupun menang di tiga kecamatan di Kota Samarinda. tetapi strategi yang diterapkan belum bisa menarik perhatian masyarakat untuk memenangkan pilkada, calon independen harus menerima kekalahan dari calon yang berasal dari partai politik yaitu Andi Harun-Rusmadi yang menang di 6 Kecamatan dan berhasil mengumpulkan 102592 suara.

2. Dalam melakukan promosi, calon independen menggunakan spanduk, baliho *billboard*, yang disebar di kecamatan maupun kelurahan yang ada di Kota Samarinda. Selain itu mereka juga menggunakan media sosial dalam promosi. Yakni dengan menggaet *influencer* dalam pembuatan video promosi yang kemudian diupload ke media sosial calon independen seperti *facebook*, dan *instagram*. Sayangnya metode tersebut kurang mendapat respons positif dari masyarakat. Itu terbukti dari pengikut calon independen di *facebook* hanya 1,9 ribu pengikut serta kurangnya respon masyarakat dikonten-konten yang diupload oleh calon independen.
3. Harga (*price*) anggaran kampanye merupakan hal yang penting pilkada, anggaran yang disediakan oleh calon independen sebanyak Rp667.000.000. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan kampanye seperti pembuatan spanduk, baliho, dan penyewaan *billboard*, kemudian untuk menyewa media lokal, selain itu juga biaya tersebut digunakan, ternyata total dana yang dianggarkan tersebut masih kurang jika dibandingkan dana yang disediakan oleh partai politik, karena dana kampanye juga merupakan salah satu tombak dalam memenangkan kontestasi pilkada. Harga psikologis, masyarakat memilih calon independen karena dengan melihat latar belakang yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut sangat baik mulai dari tingkat pendidikan yang dimiliki serta rekam jejak yang bekerja di birokrasi



pemerintahan dan sebagai anggota legislatif, dengan latar belakang yang baik serta mempunyai pengalaman yang banyak tentunya hal tersebut akan menjadi nilai tambah untuk pasangan calon dimata masyarakat. Kemudian untuk harga citra nasional, dengan visi dan misi serta program prioritas yang dibuat untuk kebutuhan masyarakat, selain itu keinginan dekat dengan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat jika nantinya pasangan tersebut terpilih menjadi kepala daerah, mereka dapat membawa hal-hal yang positif untuk daerah mereka seperti pembangunan

infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia.

4. Tempat (*palce*) dengan mengunjungi para pedagang yang berada di pasar tradisional, korban terdampak banjir, kelompok difabel serta event tertentu hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan program unggulan serta visi dan misi dengan hal tersebut dapat meningkatkan popularitas serta elektabilitas dari calon independen
5. Dengan faktor pendukung yang dimiliki calon independen mulai sah secara undang-undang contohnya undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor pendukung untuk pasangan calon independen, dengan adanya faktor tersebut yang membuka pintu lebar untuk calon independen bisa ikut dalam kontestasi politik tanpa adanya partai politik.

## REFERENSI

### Books:

Ali Safa'at Muchamad. (2011). *Pembubaran partai politik pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*(Jakarta:Rajawali pers, 2011), h.31

Budiardjo, Miriam. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu*

*Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri . Semarang

Firmanzah. (2012). *Marketing Politik* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 194

Lexy, J Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew B. A. Michael Huberman dan Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press

Pratikno. (2019). *Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3,2019, h. 417: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Singarimbun, M & Effendi, S. (2011). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.

Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Zuhro,Siti R,dkk. (2009). *Demokrasi Lokal perubahan dan kesinambunganNilai-nilai BudayaPolitik Lokal Di Jawa Timur, Sumbang,Sulssel dan Bali*